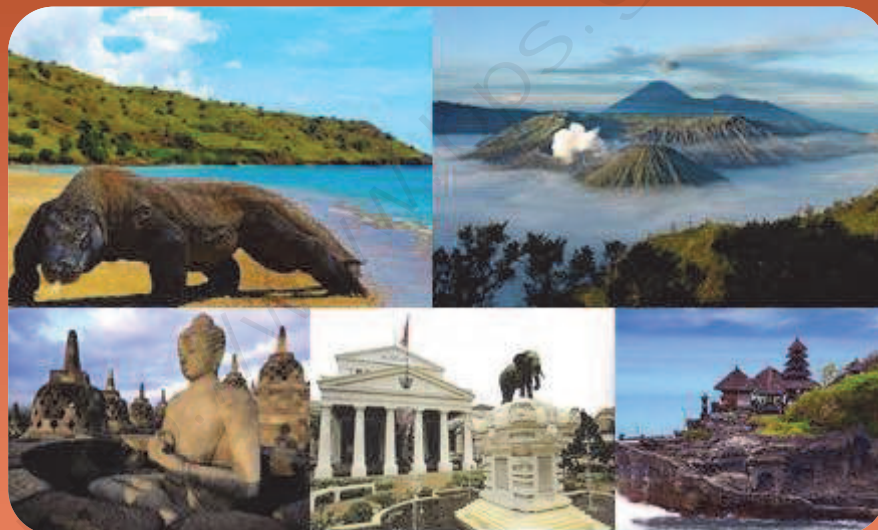




KATALOG BPS : 8401005

PROFIL OBJEK DAYA TARIK WISATA

2013



BADAN PUSAT STATISTIK

PROFIL OBJEK DAYA TARIK WISATA

2013



PROFIL OBJEK DAYA TARIK WISATA TAHUN 2013

ISSN : 978-979-064-636-0

No. Publikasi :

Katalog BPS : 8401005

Ukuran Buku : 28 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : 57 halaman

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Statistik Pariwisata

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

CV. Tapasuma Ratu Agung

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

PROFIL OBJEK DAYA TARIK WISATA TAHUN 2013

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Sentot Bangun Widoyono

Penanggung Jawab Teknis : Dedi Wiyatno

Editor : Barudin

Penulis : Wiwit Puji Sulistiyani

Pengolah data/ Penyimpan Draft : Wahyu Sunyoto Jati

KATA PENGANTAR

Publikasi **Profil Objek Daya Tarik Wisata 2013**, merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kedua. Data yang disajikan meliputi keterangan pokok tentang objek wisata seperti banyaknya usaha objek daya tarik wisata, harga tiket, rata-rata jumlah pekerja, fasilitas layanan, penyediaan air bersih, sumber tenaga listrik, dan rata-rata pendapatan.

Data dan informasi dalam publikasi ini diperoleh dari survei terhadap objek wisata komersial yang dilaksanakan pada tahun 2014 oleh BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada para pemilik/pengelola objek wisata komersial yang telah memberikan laporan dan bantuannya dan Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) atas dukungannya sehingga publikasi ini dapat disajikan.

Saran dan kritik dari para pengguna data sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi mendatang, semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2014

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa



Sasmito Hadi Wibowo

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii - vii
Penjelasan Umum		1
Ringkasan		15
Tabel-tabel		21
Lampiran		45
Tabel	: 1.1 Banyaknya Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata (Komersial dan Nonkomersial) Menurut Provinsi Tahun 2013	21
Tabel	: 1.2 Banyaknya Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Menurut Provinsi dan Jenis Usaha Tahun 2013	22
Tabel	: 1.3 Rata-rata Jumlah Pengunjung, Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja, dan Rata-rata Pendapatan per Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Menurut Provinsi Tahun 2013	23
Tabel	: 1.4 Distribusi Usaha/ Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Menurut Provinsi dan Bentuk Badan Hukum Tahun 2013	24
Tabel	: 1.5 Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Tahun Beroperasi Komersial Tahun 2013	25
Tabel	: 1.6 Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Harga Tiket Tahun 2013	26
Tabel	: 1.7 Distribusi Pekerja Pada Usaha/ Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi, Kewarganegaraan, Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2013	27

Tabel	: 1.8	Distribusi Pekerja Pada Usaha/ Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Pendidikan Tahun 2013	28
Tabel	: 1.9	Distribusi Pengunjung Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Kewarganegaraan Tahun 2013	29
Tabel	: 1.10	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Jenis Layanan yang Tersedia Tahun 2013	30
Tabel	: 1.11	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas yang Tersedia Tahun 2013	32
Tabel	: 1.12	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Sumber Air Bersih Tahun 2013	33
Tabel	: 1.13	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi dan Sumber Listrik Tahun 2013	34
Tabel	: 1.14	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi, Sistem Pengolahan Limbah, dan PEMBERLAKUAN Konsep 3R Tahun 2013	35
Tabel	: 1.15	Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Provinsi, Tahun 2013	36
Tabel	: 2.1	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Bentuk Badan Hukum Tahun 2013	37
Tabel	: 2.2	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Tahun Beroperasi Komersial Tahun 2013	37
Tabel	: 2.3	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Harga Tiket Tahun 2013	38
Tabel	: 2.4	Distribusi Pekerja Pada Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata, Kewarganegaraan, Status Pekerja, dan Jenis Kelamin Tahun 2013	38

Tabel	: 2.5	Distribusi Pekerja Pada Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Pendidikan Tahun 2013	39
Tabel	: 2.6	Distribusi Pengunjung Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Kewarganegaraan Tahun 2013	39
Tabel	: 2.7	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Jenis Layanan yang Tersedia Tahun 2013	40
Tabel	: 2.8	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Jenis Fasilitas yang Tersedia Tahun 2013	41
Tabel	: 2.9	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Sumber Air Bersih Tahun 2013	41
Tabel	: 2.10	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata dan Sumber Listrik Tahun 2013	42
Tabel	: 2.11	Distribusi Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata, Sistem Pengolahan Limbah, Dan Pemberlakuan Konsep 3R Tahun 2013	42
Tabel	: 2.12	Rata-Rata Pendapatan Dan Pengeluaran Usaha/Perusahaan Objek Daya Tarik Wisata Komersial Dirinci Menurut Jenis Usaha Pariwisata Tahun 2013	43

Penjelasan Umum

<http://www.pps.go.id>

I. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara terutama dalam upaya menggerakkan roda perekonomian karena peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan negara serta pemerataan pembangunan.

Berbagai program pengembangan destinasi pariwisata akan terus ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan potensi pariwisata nasional sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa dan mampu mendorong kegiatan sektor ekonomi lainnya seperti sektor angkutan dan industri rumah tangga (kerajinan). Selain itu kegiatan pariwisata juga diharapkan dapat mengenalkan kekayaan alam Indonesia ke dalam dan luar negeri sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

Kekayaan alam yang beraneka ragam pesonanya mulai dari keindahan alam, khazanah peninggalan sejarah, keunikan adat budaya berbagai suku bangsa dan aneka atraksi festival dan pagelaran budayanya merupakan potensi pariwisata yang besar bagi Indonesia untuk dijadikan sebagai daerah tujuan (destinasi) wisata.

Destinasi wisata nasional yang beranekaragaman jenisnya mulai dari sabang sampai merauke harus didukung dengan program untuk mempromosikannya. Program Visit Indonesia, yang dicanangkan sejak tahun 2008, dan dilanjutkan hingga sekarang, telah membawa semangat baru bagi masyarakat pariwisata di Indonesia. Melalui upaya promosi, statistik kedatangan wisatawan baik nasional maupun mancanegara pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Semakin giatnya promosi dari masing-masing Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) dibantu dengan instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) lebih tinggi dari wisatawan mancanegara (wisman). Hal ini berarti peranan wisnus merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, sehingga Pemerintah semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan atau wisata di dalam negeri. Dengan slogan “Ayo Jelajahi Nusantara”, “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”, diharapkan semakin banyak penduduk Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang negerinya sendiri.

Destinasi yang beraneka ragam dan jumlah wisatawan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya harus diimbangi dengan pelayanan yang memadai. Koordinasi dan

kebijakan dari masing-masing lembaga yang terkait menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan pelayanan.

Tahapan berikutnya yang perlu dilaksanakan adalah penyusunan data base usaha pariwisata sebagai bahan kebijakan, evaluasi dan perencanaan pariwisata. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu adanya pendataan dan pengumpulan informasi terkait destinasi pariwisata meliputi direktori usaha pariwisata, profil usaha pariwisata dan informasi-informasi lainnya. Data yang akan disajikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

II. PENGUMPULAN DATA

Pada pencacahan kali ini, nama dan alamat usaha pariwisata diperoleh dari hasil pendataan objek wisata Tahun 2013 dan media lainnya kemudian di update oleh BPS Provinsi berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) setempat. Perusahaan/usaha pariwisata yang dicacah sebanyak 1.759 buah dan tersebar di seluruh provinsi yang dilaksanakan mulai bulan April Tahun 2014.

III. RUANG LINGKUP

Kegiatan pendataan perusahaan/usaha objek daya tarik wisata tahun 2014 meliputi museum (dikelola pemerintah maupun swasta); peninggalan sejarah (dikelola pemerintah maupun swasta); taman/wisata budaya; pemandian alam; wisata gua; taman konservasi alam; taman nasional; taman hutan raya; taman wisata alam; hutan lindung, suaka margasatwa, dan cagar alam; taman laut; taman buru dan kebun buru; wisata petualangan alam; wisata agro; daya tarik wisata buatan; kawasan pariwisata; taman bertema / hiburan; taman rekreasi; dan wisata tirta (arung jeram, wisata selam, dermaga marina, selancar, jetski, dan sejenisnya). Usaha pariwisata yang dikumpulkan terbatas pada usaha pariwisata komersial. Pengelompokan daya tarik wisata tersebut berdasarkan kode 5 digit KBLI 2009, yaitu 91021, 91022, 91023, 91024, 91025, 93221, 93222, 91031, 91032, 91033, 91034, 91035, 91036, 91037, 93223, 93231, 93239, 68120, 93210, 93232, 93241, 93242, 93243, dan 93249.

IV. KONSEP DAN DEFINISI

Objek daya tarik wisata menurut UU No. 9 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Komersial, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan atau niaga. Namun dalam survei ini, yang dimaksud dengan objek wisata komersial adalah objek wisata yang menerapkan tiket masuk dengan harga/tarif tertentu bagi para pengunjungnya atau objek wisata yang mengharuskan pengunjungnya untuk membayar dengan harga/ tarif tertentu.

Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. KBLI Yang dicakup meliputi museum yang dikelola pemerintah (91021) dan dikelola swasta (91022). Contohnya adalah Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah dan sebagainya.

Peninggalan sejarah adalah sesuatu yang yang didirikan (dibangun) pada zaman dahulu yang masih ada sampai saat ini seperti rumah, gedung, candi, kraton, makam petilasan, prasasti dan sebagainya. KBLI yang dicakup meliputi peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah (91023) dan dikelola swasta (91024).

Taman/wisata budaya adalah suatu taman atau tempat wisata yang bertujuan untuk melestarikan budaya yang pernah ada seperti pemukiman/kampung adat. Kode KBLI yang dicakup adalah 91025.

Pemandian alam adalah suatu usaha pemandian umum, dimana airnya bersumber dari mata air secara alami. Kode KBLI yang dicakup adalah 93221. Contohnya adalah Pemandian Air Panas Ciater.

Gua adalah liang (lubang) besar pada kaki gunung atau tempat tertentu. Wisata gua adalah wisata yang menggunakan objek gua seperti susur gua. KBLI yang dicakup meliputi kode 93222 yaitu suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan

penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Contohnya adalah Gua Jatijajar, Gua Lawa dan sebagainya.

Taman konservasi alam adalah taman yang digunakan untuk melestarikan dan melindungi alam. Kode yang dicakup adalah 91031, mencakup kegiatan pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dan digunakan sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, dan tujuan rekreasi. Contohnya adalah Kebun Binatang Ragunan, Kebun Raya Bogor, Taman Safari, Taman Buah Mekarsari dan sebagainya.

Taman nasional adalah kawasan yang digunakan untuk melestarikan dan melindungi alam dan masih berada dalam ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kode yang dicakup adalah 91032 yakni kegiatan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, menunjang budidaya serta konservasi sumber daya alam yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Gunung Leuser (Aceh), Danau Kalimutu dan Taman Nasional Komodo (NTT), Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Gunung Palung (Kalimantan Barat).

Taman Hutan Raya (Tahura), kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata, menunjang budidaya serta konservasi sumber daya alam seperti Seulawah (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra Utara), Tahura Juanda, Curug Dago (Jawa Barat) dan Sultan Adam (Kalimantan Selatan). Kode KBLI kelompok ini adalah 91033.

Taman Wisata Alam, kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Pulau Weh (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa Barat), dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur), Taman Wisata Alam Maribaya dan air terjun, Pangandaran dan Batu Putih. Kode KBLI kelompok ini adalah 91034.

Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (CA), kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan rekreasi terbatas, seperti hutan

lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung ekosistem, tata air, erosi dan memelihara kesuburan tanah; suaka margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa dan untuk kelangsungan hidup dilakukan pembinaan terhadap habitatnya; dan cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Misalnya Cagar Alam Raya Pasi (Kalimantan Barat) dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat). Kode KBLI kelompok ini adalah 91035.

Taman Laut, kelompok ini mencakup kegiatan taman laut yang terdiri dari wilayah laut yang dilindungi dapat digunakan sebagai daerah rekreasi atau hanya wilayah untuk melestarikan habitat tertentu dan menjamin ekosistem berkelanjutan untuk organisme di wilayah tersebut. Misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Komodo, Taman Laut Kepulauan Seribu. Kode KBLI kelompok ini adalah 91036.

Taman Buru dan Kebun Buru, kelompok ini mencakup kegiatan suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu, mencakup penyediaan sarana dan prasarana berburu di blok pemanfaatan cagar alam dan suaka margasatwa, seperti Taman Buru Lingga Isaq (Aceh), Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Jawa Barat), Taman Buru Komara (Sulawesi Selatan) dan Taman Buru Moyo. Kode KBLI kelompok ini adalah 91037.

Wisata Petualangan Alam, kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya *Hiking*, *Rock Climbing*. Kode KBLI kelompok ini adalah 93223.

Wisata Agro, kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. . Kode KBLI kelompok ini adalah 93231.

Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata *Outbond*. Kode KBLI kelompok ini adalah 93239.

Kawasan Pariwisata, kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul

untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata. Misalnya *Bali Tourism Development Corporation (BTDC)*, *Tanjung Lesung*, *Lombok Tourism Development Corporation (LTDC)*. Kode KBLI kelompok ini adalah 68120.

Taman Bertema/Taman Hiburan, kelompok ini mencakup kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatannya mencakup pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya *Taman Bertema Dunia Fantasi*, *Atlantis*, *Jungle*, *Water Boom* dan sejenisnya. Kode KBLI kelompok ini adalah 93210.

Taman Rekreasi/Taman Wisata, kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. contohnya seperti Pantai Matahari, Pantai Losari dan sebagainya. Kode KBLI kelompok ini adalah 93232.

Wisata Tirta, KBLI yang dicakup meliputi:

a. 93241: Arung Jeram

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu. Misalnya *Arung jeram Sobek Bali*, *Arung jeram Arus Liar Citarik*.

b. 93242: Wisata Selam

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu. Termasuk kegiatan *snorkeling*.

c. 93243: Dermaga Marina

Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya *Marina Ancol*, *Benoa Marine*.

d. 93249: Wisata Tirta Lainnya

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93243 seperti selancar, selancar angin, para layar, motor air, dan memancing di laut atau danau sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut berperan serta tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.

Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggungjawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Yayasan adalah suatu badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Perwakilan perusahaan asing adalah bentuk badan hukum perusahaan yang mengikuti nama badan hukum perusahaan yang membawahnya di luar wilayah Indonesia. Contoh : Ltd. (Limited), Corp. (Corporation).

Pemerintah (UPT) adalah satuan organisasi mandiri bentukan pemerintah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Umumnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini berada dibawah kementrian tertentu.

Tidak berbadan hukum adalah perusahaan/usaha yang tidak memiliki status badan hukum, termasuk di dalamnya usaha perorangan.

Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan beroperasi secara komersial (tidak termasuk beroperasi percobaan).

Pekerja tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut.

Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha yang menerima upah/gaji secara tidak tetap, tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut.

Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu.

Pekerja asing adalah pekerja yang bukan warga negara Indonesia yang bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).

Asuransi pengunjug adalah pertanggungan, berupa perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Pusat informasi adalah pusat penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa.

Interpretasi terhadap objek daya tarik adalah kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap objek daya tarik. Misalnya penjelasan singkat tentang asal-usul hewan di kebun binatang.

Prosedur kerja penyelenggaraan kegiatan (SOP) adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam menjalankan dan memecahkan suatu masalah yang didukung dengan penggunaan peralatan pengawasan.

Prosedur keamanan dan keselamatan pengunjug termasuk jalur evakuasi adalah tahapan kegiatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengunjug serta tata cara pengungsian atau pemindahan pengunjug dari lokasi bencana (kecelakaan, daerah berbahaya) ke tempat yang aman.

Jasa pramuwisata adalah layanan yang diberikan oleh petugas pariwisata (pemandu wisata) yang berkewajiban memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan wisatawan (pengunjug).

Toilet umum adalah tempat/ fasilitas untuk keperluan cuci tangan dan cuci muka, serta kamar kecil (kakus).

Area parkir adalah wilayah terbuka tempat menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor atau mobil bagi pengunjung untuk beberapa saat.

Tempat ibadah adalah ruangan/ fasilitas yang disediakan bagi pengunjung untuk melakukan ibadah.

Layanan makan minum (restorasi) adalah tersedianya restoran (rumah makan, kios, gerai) yang menjual makanan dan minuman bagi para pengunjung.

Toko/kios cenderamata adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang sebagai kenang-kenangan (pertanda ingat, tanda mata) dari lokasi daya tarik wisata.

Pendapatan adalah seluruh pendapatan utama dan pendapatan lainnya yang terkait dengan kegiatan/usaha yang dilakukan.

Pengeluaran adalah seluruh pengeluaran (biaya) administrasi/ operasional kantor perusahaan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha, termasuk upah/gaji pekerja/karyawan.

Modal Sendiri adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; berupa harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan modal sendiri.

Modal Saham adalah bukti kepemilikan peserta (andil atau sero) permodalan pada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yang memiliki hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

Hibah adalah pemberian modal secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kekayaan (uang, barang, dan sebagainya) kepada perusahaan atau pihak lain.

Pinjaman Bank adalah memakai uang dari Pihak Bank untuk waktu tertentu dan syarat-syarat sesuai ketentuan Bank untuk melakukan investasi dan operasional kerja perusahaan.

Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Pinjaman yang berasal dari Lembaga keuangan non Bank berupa uang untuk waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan pinjaman untuk melakukan investasi dan operasional kerja perusahaan.

Status penanaman modal yang dimaksud pada rincian ini adalah permodalan yang dikuasai perusahaan pada waktu pendirian, atau pada waktu statusnya ditentukan oleh BKPM.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMDN apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku.

Penanaman Modal Asing (PMA), suatu perusahaan dikatakan mempunyai fasilitas permodalan PMA apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden melalui BKPM bahwa usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku.

Bentuk Perusahaan Modal Asing adalah perusahaan penanaman modal asing ini harus berbentuk Badan Hukum Indonesia (PT), sehingga pihak asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia tidak bisa sebagai perseorangan, berarti berlaku ketentuan yang mengatur PT (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Non Fasilitas adalah suatu perusahaan yang status permodalannya tidak mendapat fasilitas dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atau BKPM baik sebagai PMA maupun PMDN. Perusahaan dalam kategori ini dapat terdiri dari :

1. Perusahaan yang belum/tidak pernah mengajukan permohonan tentang fasilitas permodalannya kepada BKPM atau kepada presiden.
2. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan fasilitas permodalan tetapi belum disetujui oleh presiden atau oleh BKPM (masih dalam proses).

Sistem pengolahan limbah adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan dan mengolah limbah baik cair maupun padat agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan (relatif aman).

Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yaitu terdiri dari :

1. *Reduce* (Mengurangi)
Reduce atau pengurangan adalah kegiatan mengurangi pemakaian atau pola perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi bertumpuknya sampah wadah produk di rumah .

2. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

Reuse atau penggunaan kembali adalah kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai.

3. *Recycle* (Mendaur Ulang)

Recycle atau mendaur ulang adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materialnya untuk dapat digunakan lebih lanjut.

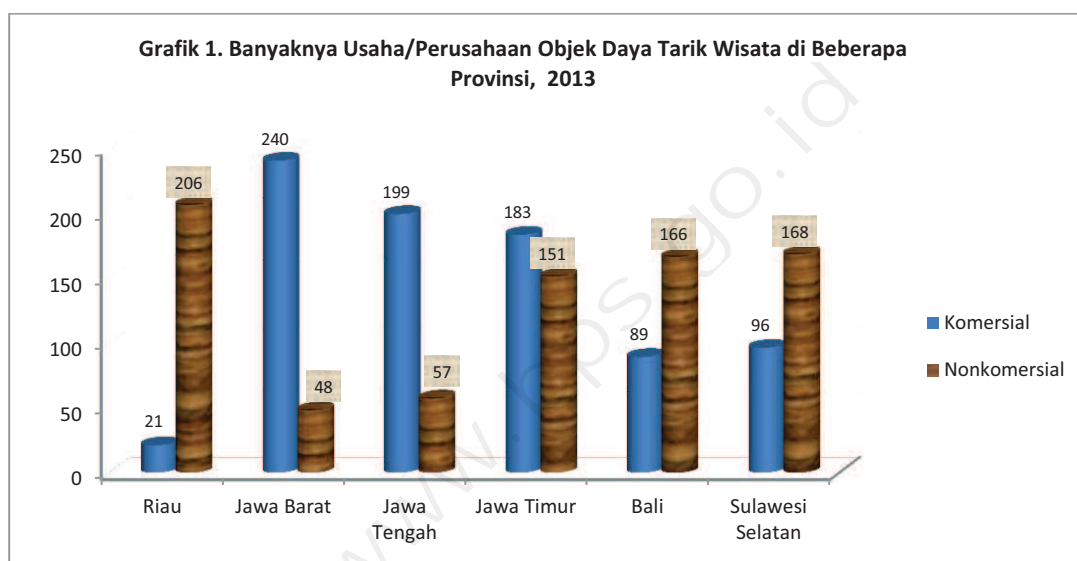
<http://www.bps.go.id>

Ringkasan

<http://www.pps.go.id>

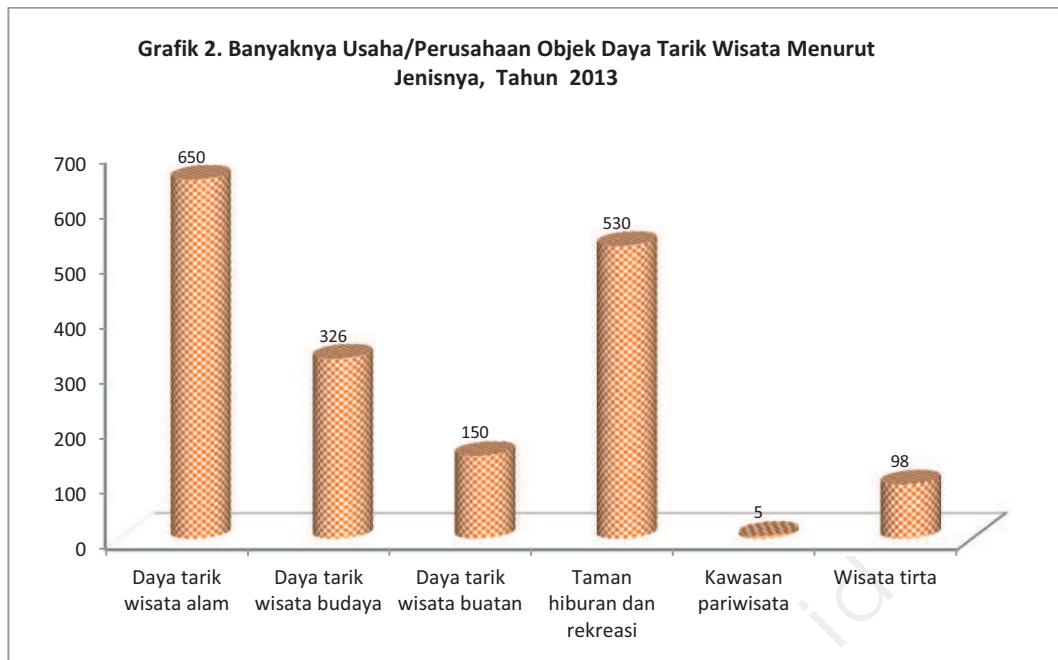
I. PROFIL PERUSAHAAN/USAHA

Jumlah perusahaan atau usaha objek daya tarik wisata tahun 2013 sebanyak 4.651 perusahaan yang mencakup usaha komersial dan nonkomersial. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah usaha objek daya tarik wisata terbanyak yaitu mencapai 334 usaha, diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebanyak 288 usaha. Sedangkan provinsi yang memiliki jumlah usaha objek daya tarik wisata paling sedikit adalah provinsi Sulawesi Barat dengan 14 usaha.



Jumlah usaha objek daya tarik wisata nonkomersial tercatat jauh lebih banyak dibandingkan usaha komersial, yaitu sebesar 2.892 usaha. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah usaha objek daya tarik wisata komersial terbanyak, yaitu 240 usaha, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 199 dan 183 usaha. Sedangkan provinsi dengan jumlah usaha objek daya tarik wisata nonkomersial terbanyak berturut turut adalah provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 206, 185, dan 168 usaha.

Dalam hal jenis usaha objek daya tarik wisata komersial, daya tarik wisata alam mempunyai jumlah terbanyak, yaitu 650 usaha. Hal ini membuktikan Indonesia memiliki banyak potensi keindahan alam. Di urutan kedua adalah taman hiburan dan rekreasi sebanyak 530 usaha. Provinsi dengan jumlah usaha objek daya tarik wisata alam terbanyak adalah Jawa Barat dengan 114 usaha. Pengelolaan usaha objek daya tarik wisata secara komersial lebih banyak terpusat di pulau Jawa dan Bali, sementara di pulau lain masih banyak yang belum dikelola dengan baik.



Perusahaan atau usaha objek daya tarik wisata komersial sebagian besar dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu sebesar 47,77 persen sedangkan 15,71 persen berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Sebanyak 33,81 persen usaha objek daya tarik wisata komersial mulai beroperasi antara tahun 2000 sampai 2009 dan 19,22 persen antara tahun 1990 sampai 1999. Berdasarkan harga tiket, 44,58 persen usaha objek daya tarik wisata komersial menjual tiket masuk dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 20.000. Sedangkan 44,18 persennya menjual tiket dengan harga kurang dari Rp 5.000. Hal ini mengindikasikan bahwa harga tiket masuk sebagian besar usaha objek daya tarik wisata komersial cukup terjangkau oleh masyarakat.

Rata-rata jumlah pengunjung pada tahun 2013 mencapai 113.439 kunjungan dan lebih dari 90 persennya adalah warga negara Indonesia. Rata-rata jumlah kunjungan terbesar terdapat di provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 690.766 pengunjung per tahun. Sedangkan rata-rata jumlah pengunjung terendah terdapat pada provinsi Papua dengan 1.900 kunjungan.

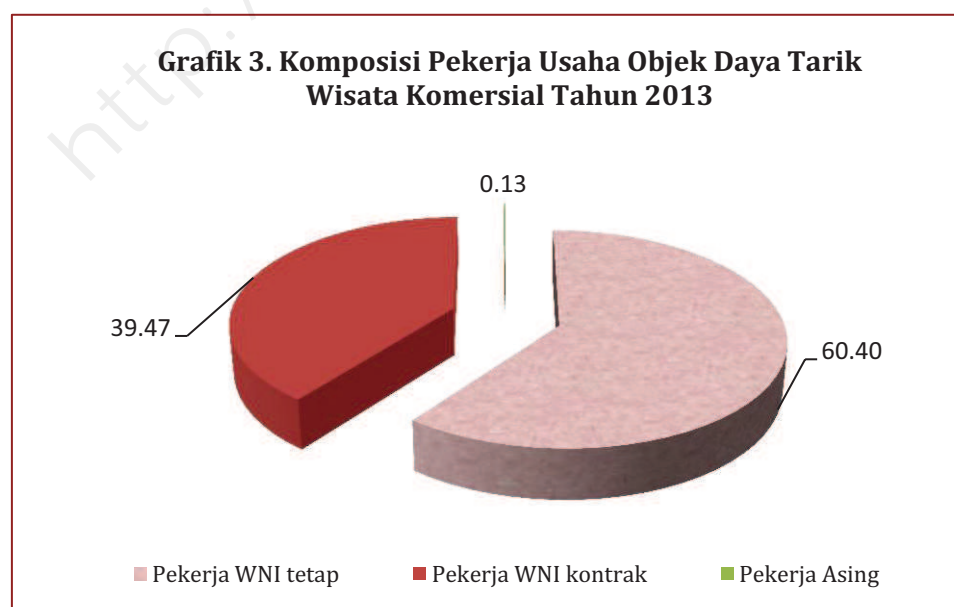
Peningkatan jumlah kunjungan pada usaha objek daya tarik wisata harus diimbangi dengan fasilitas dan layanan yang memadai. Dari 1.759 usaha objek daya tarik wisata, penyediaan toilet, area parkir, dan tempat ibadah yang dirasa cukup penting, dimana 91,15 persen usaha objek daya tarik wisata komersial menyediakan toilet umum, 88,12 persen menyediakan area parkir, dan 74,80 persen memiliki tempat ibadah.

Selain fasilitas dan layanan yang memadai, tersedianya sumber air bersih dan penerangan yang cukup juga sangat dibutuhkan oleh usaha objek daya tarik wisata. Sebanyak 62,92 persen usaha objek daya tarik wisata komersial menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih dan 70,97 persen menggunakan PLN sebagai sumber tenaga listrik.

Sementara itu untuk penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada usaha objek daya tarik wisata komersial masih cukup rendah. Tercatat hanya sekitar 21,21 persen yang telah menerapkan konsep tersebut. Untuk pengolahan limbah, sebagian besar dibuang keluar kawasan.

II. TENAGA KERJA

Usaha objek daya tarik wisata komersial tahun 2013 mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Tercatat bahwa rata-rata setiap usaha objek daya tarik wisata memperkerjakan sebanyak 25 orang pekerja yang di dominasi oleh pekerja laki-laki sebesar 75 persen. Rata-rata penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 58 orang per perusahaan, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 41 orang per perusahaan, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Papua yang hanya 3 orang per perusahaan.



Apabila dilihat dari sisi status ketenagakerjaannya, usaha objek daya tarik wisata komersial memperkerjakan sebesar 60,40 persen pekerja tetap berkebangsaan Indonesia, 39,47 persen pekerja kontrak/tidak tetap berkebangsaan Indonesia, dan sisanya 0,13 persen adalah pekerja asing. Diantara seluruh pekerja tersebut, proporsi yang mempunyai sertifikat pariwisata hanya sebesar 7,55 persen.

Dilihat menurut tingkat pendidikan, pekerja dengan pendidikan minimal diploma tercatat sebesar 14,63 persen. Selebihnya pekerja dengan pendidikan SLTA sebesar 61,54 persen dan minimal SLTP sebesar hampir 24 persen.

III. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

Secara umum, rata-rata pendapatan objek daya tarik wisata komersial tahun 2013 adalah 2,86 milyar rupiah. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan rata-rata pendapatan terbesar yaitu 53,45 milyar rupiah, diikuti oleh Bali dan DI Yogyakarta dengan masing-masing pendapatan rata-rata sebesar 2,69 milyar dan 2,31 milyar rupiah. Sedangkan provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan rata-rata pendapatan terkecil yaitu 37,07 juta rupiah. Rata-rata pendapatan terbesar diperoleh pada perusahaan/usaha Kawasan Pariwisata yaitu mencapai 209,52 milyar rupiah.

Rata-rata biaya pengeluaran objek daya tarik wisata komersial tahun 2013 mencapai 1,51 milyar rupiah. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata pengeluaran terbesar yaitu mencapai 16,37 milyar rupiah. Sedangkan Maluku Utara adalah provinsi dengan rata-rata biaya pengeluaran terkecil yaitu hanya 21,11 juta rupiah.

Tabel-tabel

<http://www.ops.go.id>

**TABEL 1.1 : BANYAKNYA USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA
(KOMERSIAL DAN NONKOMERSIAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2013**

Provinsi	Jumlah Usaha		Jumlah
	Komersial	Nonkomersial	
(1)	(2)	(3)	(4)
11 ACEH	54	145	199
12 SUMATERA UTARA	54	32	86
13 SUMATERA BARAT	51	77	128
14 R I A U	21	206	227
15 J A M B I	15	68	83
16 SUMATERA SELATAN	21	14	35
17 BENGKULU	14	155	169
18 LAMPUNG	53	85	138
19 KEP. BANGKA BELITUNG	23	146	169
21 KEPULAUAN RIAU	21	185	206
31 DKI JAKARTA	69	42	111
32 JAWA BARAT	240	48	288
33 JAWA TENGAH	199	57	256
34 D.I. YOGYAKARTA	67	84	151
35 JAWA TIMUR	183	151	334
36 B A N T E N	58	49	107
51 B A L I	89	166	255
52 NUSA TENGGARA BARAT	30	39	69
53 NUSA TENGGARA TIMUR	71	138	209
61 KALIMANTAN BARAT	23	34	57
62 KALIMANTAN TENGAH	22	113	135
63 KALIMANTAN SELATAN	34	132	166
64 KALIMANTAN TIMUR	37	43	80
71 SULAWESI UTARA	28	19	47
72 SULAWESI TENGAH	51	121	172
73 SULAWESI SELATAN	96	168	264
74 SULAWESI TENGGARA	17	129	146
75 GORONTALO	14	62	76
76 SULAWESI BARAT	8	6	14
81 MALUKU	24	36	60
82 MALUKU UTARA	24	73	97
91 PAPUA BARAT	28	46	74
94 P A P U A	20	23	43
INDONESIA	1 759	2 892	4 651

TABEL 1.2 : BANYAKNYA USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL MENURUT PROVINSI DAN JENIS USAHA TAHUN 2013

Provinsi	Daya Tarik Wisata			Taman Hiburan dan Rekreasi	Kawasan Pariwisata	Wisata Tirta	Jumlah
	Alam	Budaya	Buatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 ACEH	26	2	4	21	-	1	54
12 SUMATERA UTARA	29	8	2	15	-	-	54
13 SUMATERA BARAT	26	13	4	8	-	-	51
14 R I A U	8	4	-	9	-	-	21
15 J A M B I	10	2	1	2	-	-	15
16 SUMATERA SELATAN	7	5	-	7	-	2	21
17 BENGKULU	6	3	1	1	-	3	14
18 LAMPUNG	16	5	4	25	-	3	53
19 KEP. BANGKA BELITUNG	5	4	1	11	-	2	23
21 KEPULAUAN RIAU	4	1	2	13	-	1	21
31 DKI JAKARTA	8	39	5	9	2	6	69
32 JAWA BARAT	114	38	24	49	-	15	240
33 JAWA TENGAH	64	46	30	49	1	9	199
34 D.I. YOGYAKARTA	16	18	7	26	-	-	67
35 JAWA TIMUR	70	19	23	58	-	13	183
36 B A N T E N	13	2	7	28	1	7	58
51 B A L I	40	31	5	6	1	6	89
52 NUSA TENGGARA BARAT	12	3	-	12	-	3	30
53 NUSA TENGGARA TIMUR	22	11	1	34	-	3	71
61 KALIMANTAN BARAT	8	2	2	10	-	1	23
62 KALIMANTAN TENGAH	10	2	4	6	-	-	22
63 KALIMANTAN SELATAN	15	6	-	11	-	2	34
64 KALIMANTAN TIMUR	11	4	6	12	-	4	37
71 SULAWESI UTARA	14	1	3	7	-	3	28
72 SULAWESI TENGAH	22	6	1	21	-	1	51
73 SULAWESI SELATAN	38	28	6	19	-	5	96
74 SULAWESI TENGGARA	4	-	1	11	-	1	17
75 GORONTALO	5	1	1	7	-	-	14
76 SULAWESI BARAT	3	3	-	2	-	-	8
81 MALUKU	3	2	1	17	-	1	24
82 MALUKU UTARA	3	6	1	13	-	1	24
91 PAPUA BARAT	11	7	3	3	-	4	28
94 P A P U A	7	4	-	8	-	1	20
INDONESIA	650	326	150	530	5	98	1 759

TABEL 1.3 : RATA-RATA JUMLAH PENGUNJUNG, RATA-RATA JUMLAH TENAGA KERJA, DAN RATA-RATA PENDAPATAN PER USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2013

Provinsi	Rata-rata jumlah pengunjung	Rata-rata pekerja (orang)	Rata-rata pendapatan perusahaan (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
11 ACEH	16 676	16	189 330 429
12 SUMATERA UTARA	57 017	32	989 963 768
13 SUMATERA BARAT	81 364	13	728 662 601
14 R I A U	31 882	25	1 046 133 679
15 J A M B I	59 388	18	729 177 838
16 SUMATERA SELATAN	30 433	31	823 407 895
17 BENGKULU	16 667	10	58 234 462
18 LAMPUNG	14 659	22	376 562 865
19 KEP. BANGKA BELITUNG	62 982	20	752 041 411
21 KEPULAUAN RIAU	44 891	26	464 585 438
31 DKI JAKARTA	690 766	58	53 446 678 823
32 JAWA BARAT	173 847	41	2 009 824 816
33 JAWA TENGAH	161 910	24	1 950 314 672
34 D.I. YOGYAKARTA	267 851	34	2 312 334 118
35 JAWA TIMUR	124 974	25	1 612 750 073
36 B A N T E N	40 943	18	616 225 089
51 B A L I	101 917	39	2 686 652 834
52 NUSA TENGGARA BARAT	42 016	11	253 081 293
53 NUSA TENGGARA TIMUR	7 249	6	168 647 010
61 KALIMANTAN BARAT	37 094	29	653 316 202
62 KALIMANTAN TENGAH	12 351	22	128 648 594
63 KALIMANTAN SELATAN	37 182	15	260 914 415
64 KALIMANTAN TIMUR	41 571	17	475 471 711
71 SULAWESI UTARA	2 752	9	291 192 400
72 SULAWESI TENGAH	6 058	13	37 068 340
73 SULAWESI SELATAN	27 931	21	248 088 101
74 SULAWESI TENGGARA	13 045	12	158 246 941
75 GORONTALO	19 081	9	104 199 111
76 SULAWESI BARAT	7 667	12	53 852 125
81 MALUKU	11 080	7	96 380 784
82 MALUKU UTARA	2 694	9	108 083 895
91 PAPUA BARAT	36 510	9	402 350 000
94 P A P U A	1 900	3	63 890 667
INDONESIA	113 439	25	2 862 991 426

TABEL 1.4: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL MENURUT PROVINSI DAN BENTUK BADAN HUKUM TAHUN 2013

Provinsi	Berbadan Hukum			Tidak Berbadan Hukum	Jumlah
	PT/PT (Persero) / Perum	UPT (Pemerintah)	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 ACEH	7.14	32.14	3.57	57.14	100.00
12 SUMATERA UTARA	11.36	34.09	13.64	40.91	100.00
13 SUMATERA BARAT	16.67	54.76	9.52	19.05	100.00
14 R I A U	7.14	50.00	28.57	14.29	100.00
15 J A M B I	7.69	76.92	-	15.38	100.00
16 SUMATERA SELATAN	26.32	47.37	15.79	10.53	100.00
17 BENGKULU	-	61.54	15.38	23.08	100.00
18 LAMPUNG	17.39	34.78	13.04	34.78	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	26.32	36.84	26.32	10.53	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	38.46	15.38	15.38	30.77	100.00
31 DKI JAKARTA	42.50	42.50	12.50	2.50	100.00
32 JAWA BARAT	23.08	42.31	17.03	17.58	100.00
33 JAWA TENGAH	12.00	65.14	9.71	13.14	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	10.71	44.64	14.29	30.36	100.00
35 JAWA TIMUR	19.19	57.58	9.09	14.14	100.00
36 B A N T E N	21.95	14.63	14.63	48.78	100.00
51 B A L I	17.33	46.67	16.00	20.00	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	7.69	38.46	19.23	34.62	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	3.57	62.50	-	33.93	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	41.18	23.53	29.41	5.88	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	6.25	62.50	6.25	25.00	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	11.11	55.56	11.11	22.22	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	26.92	50.00	7.69	15.38	100.00
71 SULAWESI UTARA	10.00	-	30.00	60.00	100.00
72 SULAWESI TENGAH	15.00	35.00	5.00	45.00	100.00
73 SULAWESI SELATAN	8.33	52.78	20.83	18.06	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	17.65	17.65	5.88	58.82	100.00
75 GORONTALO	-	88.89	-	11.11	100.00
76 SULAWESI BARAT	-	50.00	-	50.00	100.00
81 MALUKU	-	50.00	-	50.00	100.00
82 MALUKU UTARA	-	52.63	5.26	42.11	100.00
91 PAPUA BARAT	-	-	50.00	50.00	100.00
94 P A P U A	-	33.33	-	66.67	100.00
INDONESIA	15.71	47.77	12.52	24.00	100.00

**TABEL 1.5: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL
DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN TAHUN BEROPERASI KOMERSIAL TAHUN 2013**

Provinsi	Tahun Mulai Beroperasi					Jumlah
	< 1980	1980 - 1989	1990 - 1999	2000 - 2009	> 2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 ACEH	3.57	-	17.86	53.57	25.00	100.00
12 SUMATERA UTARA	13.64	9.09	11.36	43.18	22.73	100.00
13 SUMATERA BARAT	16.67	23.81	19.05	28.57	11.90	100.00
14 R I A U	7.14	7.14	7.14	50.00	28.57	100.00
15 J A M B I	-	7.69	15.38	61.54	15.38	100.00
16 SUMATERA SELATAN	-	15.79	26.32	26.32	31.58	100.00
17 BENGKULU	7.69	30.77	7.69	38.46	15.38	100.00
18 LAMPUNG	-	17.39	8.70	39.13	34.78	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	15.79	42.11	42.11	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	-	-	23.08	38.46	38.46	100.00
31 DKI JAKARTA	32.50	15.00	17.50	17.50	17.50	100.00
32 JAWA BARAT	6.04	14.84	22.53	31.32	25.27	100.00
33 JAWA TENGAH	16.57	22.86	13.71	33.14	13.71	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	17.86	28.57	14.29	23.21	16.07	100.00
35 JAWA TIMUR	13.13	17.17	22.22	29.29	18.18	100.00
36 B A N T E N	4.88	7.32	21.95	34.15	31.71	100.00
51 B A L I	16.00	16.00	29.33	25.33	13.33	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	3.85	23.08	15.38	38.46	19.23	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	-	7.14	30.36	51.79	10.71	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	11.76	5.88	11.76	35.29	35.29	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	6.25	-	25.00	43.75	25.00	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	11.11	7.41	18.52	25.93	37.04	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	3.85	3.85	26.92	42.31	23.08	100.00
71 SULAWESI UTARA	-	10.00	10.00	60.00	20.00	100.00
72 SULAWESI TENGAH	-	25.00	15.00	40.00	20.00	100.00
73 SULAWESI SELATAN	13.89	15.28	15.28	29.17	26.39	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	-	17.65	35.29	11.76	35.29	100.00
75 GORONTALO	22.22	-	-	44.44	33.33	100.00
76 SULAWESI BARAT	-	12.50	-	50.00	37.50	100.00
81 MALUKU	6.25	12.50	25.00	37.50	18.75	100.00
82 MALUKU UTARA	5.26	-	15.79	31.58	47.37	100.00
91 PAPUA BARAT	-	-	-	25.00	75.00	100.00
94 P A P U A	-	13.33	40.00	40.00	6.67	100.00
INDONESIA	10.21	14.91	19.22	33.81	21.85	100.00

**TABEL 1.6: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL
DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN HARGA TIKET TAHUN 2013**

Provinsi	Harga Tiket (Rupiah)				Jumlah
	< 5.000	5.000 – 20.000	21.000 – 100.000	> 100.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 ACEH	57.14	28.57	7.14	7.14	100.00
12 SUMATERA UTARA	40.91	50.00	6.82	2.27	100.00
13 SUMATERA BARAT	40.48	57.14	2.38	-	100.00
14 R I A U	35.71	50.00	14.29	-	100.00
15 J A M B I	76.92	23.08	-	-	100.00
16 SUMATERA SELATAN	31.58	36.84	26.32	5.26	100.00
17 BENGKULU	46.15	46.15	7.69	-	100.00
18 LAMPUNG	26.09	60.87	13.04	-	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	52.63	36.84	10.53	-	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	15.38	69.23	15.38	-	100.00
31 DKI JAKARTA	32.50	37.50	22.50	7.50	100.00
32 JAWA BARAT	35.16	56.04	6.04	2.75	100.00
33 JAWA TENGAH	58.29	35.43	5.14	1.14	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	33.93	48.21	12.50	5.36	100.00
35 JAWA TIMUR	45.45	48.48	3.03	3.03	100.00
36 B A N T E N	21.95	58.54	14.63	4.88	100.00
51 B A L I	21.33	56.00	14.67	8.00	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	50.00	42.31	3.85	3.85	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	69.64	26.79	1.79	1.79	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	17.65	76.47	-	5.88	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	43.75	50.00	6.25	-	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	66.67	14.81	18.52	-	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	42.31	42.31	15.38	-	100.00
71 SULAWESI UTARA	10.00	50.00	30.00	10.00	100.00
72 SULAWESI TENGAH	75.00	25.00	-	-	100.00
73 SULAWESI SELATAN	44.44	48.61	6.94	-	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	52.94	29.41	17.65	-	100.00
75 GORONTALO	44.44	55.56	-	-	100.00
76 SULAWESI BARAT	75.00	25.00	-	-	100.00
81 MALUKU	62.50	37.50	-	-	100.00
82 MALUKU UTARA	78.95	10.53	-	10.53	100.00
91 PAPUA BARAT	-	75.00	25.00	-	100.00
94 P A P U A	46.67	13.33	40.00	-	100.00
INDONESIA	44.18	44.58	8.53	2.71	100.00

TABEL 1.7: DISTRIBUSI PEKERJA PADA USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI, KEWARGANEGARAAN, STATUS PEKERJA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2013

Provinsi	Kewarganegaraan Pekerja						Jumlah	
	Status Pekerja WNI				Pekerja WNA			
	Tetap		Kontrak/ Tidak Tetap					
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11 ACEH	38.95	16.63	41.23	3.19	-	-	80.18	19.82
12 SUMATERA UTARA	39.90	22.78	24.86	12.25	0.21	-	64.97	35.03
13 SUMATERA BARAT	41.13	15.78	26.24	15.60	-	1.24	67.38	32.62
14 R I A U	34.30	12.21	40.12	13.37	-	-	74.42	25.58
15 J A M B I	48.47	22.27	19.65	9.61	-	-	68.12	31.88
16 SUMATERA SELATAN	31.69	17.55	32.54	18.23	-	-	64.22	35.78
17 BENGKULU	52.00	24.80	19.20	4.00	-	-	71.20	28.80
18 LAMPUNG	47.87	21.71	25.19	5.23	-	-	73.06	26.94
19 KEP. BANGKA BELITUNG	13.72	8.71	51.98	25.07	0.26	0.26	65.96	34.04
21 KEPULAUAN RIAU	56.10	10.76	7.27	25.87	-	-	63.37	36.63
31 DKI JAKARTA	51.48	26.13	17.53	4.86	-	-	69.01	30.99
32 JAWA BARAT	46.59	11.67	32.34	9.39	-	-	78.93	21.07
33 JAWA TENGAH	36.60	11.43	42.59	9.38	-	-	79.19	20.81
34 D.I. YOGYAKARTA	45.88	20.18	26.29	7.33	0.05	0.27	72.23	27.77
35 JAWA TIMUR	39.10	16.61	34.66	8.96	-	0.66	73.77	26.23
36 B A N T E N	61.18	14.13	20.30	4.39	-	-	81.48	18.52
51 B A L I	46.97	18.86	25.19	8.80	0.17	-	72.33	27.67
52 NUSA TENGGARA BARAT	46.88	10.07	29.17	13.89	-	-	76.04	23.96
53 NUSA TENGGARA TIMUR	50.83	10.50	34.53	3.59	0.28	0.28	85.64	14.36
61 KALIMANTAN BARAT	55.42	18.81	18.20	7.57	-	-	73.62	26.38
62 KALIMANTAN TENGAH	51.29	12.89	29.80	6.02	-	-	81.09	18.91
63 KALIMANTAN SELATAN	43.29	10.63	33.42	12.66	-	-	76.71	23.29
64 KALIMANTAN TIMUR	44.87	13.67	30.52	10.93	-	-	75.40	24.60
71 SULAWESI UTARA	38.89	22.22	31.11	7.78	-	-	70.00	30.00
72 SULAWESI TENGAH	35.45	20.90	29.10	14.55	-	-	64.55	35.45
73 SULAWESI SELATAN	49.97	18.55	28.80	2.68	-	-	78.77	21.23
74 SULAWESI TENGGARA	59.80	22.11	10.55	7.54	-	-	70.35	29.65
75 GORONTALO	25.88	10.59	49.41	14.12	-	-	75.29	24.71
76 SULAWESI BARAT	35.48	9.68	30.11	24.73	-	-	65.59	34.41
81 MALUKU	49.07	27.78	18.52	4.63	-	-	67.59	32.41
82 MALUKU UTARA	30.56	16.11	24.44	28.33	0.56	-	55.56	44.44
91 PAPUA BARAT	56.76	21.62	16.22	5.41	-	-	72.97	27.03
94 P A P U A	39.22	35.29	17.65	7.84	-	-	56.86	43.14
INDONESIA	44.39	16.01	30.27	9.20	0.04	0.09	74.70	25.30

TABEL 1.8: DISTRIBUSI PEKERJA PADA USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN PENDIDIKAN TAHUN 2013

Provinsi	Pendidikan				Jumlah
	≤SLTP	SLTA	Diploma I/II/III	Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 ACEH	23.92	68.34	1.82	5.92	100.00
12 SUMATERA UTARA	23.28	58.74	7.81	10.17	100.00
13 SUMATERA BARAT	29.61	50.89	4.08	15.43	100.00
14 R I A U	16.57	77.03	1.74	4.65	100.00
15 J A M B I	12.66	62.01	3.06	22.27	100.00
16 SUMATERA SELATAN	17.21	58.77	9.88	14.14	100.00
17 BENGKULU	34.40	54.40	0.80	10.40	100.00
18 LAMPUNG	14.92	73.45	2.33	9.30	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	28.23	66.75	2.37	2.64	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	23.55	65.12	1.74	9.59	100.00
31 DKI JAKARTA	8.94	75.04	2.26	13.76	100.00
32 JAWA BARAT	23.52	62.87	4.34	9.26	100.00
33 JAWA TENGAH	32.05	56.79	3.83	7.33	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	19.54	63.14	4.14	13.17	100.00
35 JAWA TIMUR	27.96	59.09	3.58	9.38	100.00
36 B A N T E N	36.63	51.99	3.16	8.23	100.00
51 B A L I	12.41	66.45	9.86	11.28	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	30.56	59.38	2.78	7.29	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	16.57	65.47	6.63	11.33	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	48.26	40.49	4.50	6.75	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	19.77	55.87	8.88	15.47	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	23.04	64.05	2.78	10.13	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	38.72	49.89	2.96	8.43	100.00
71 SULAWESI UTARA	25.56	65.56	-	8.89	100.00
72 SULAWESI TENGAH	19.40	71.27	1.12	8.21	100.00
73 SULAWESI SELATAN	30.21	51.98	6.76	11.05	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	16.08	75.88	4.02	4.02	100.00
75 GORONTALO	37.65	56.47	2.35	3.53	100.00
76 SULAWESI BARAT	7.53	80.65	1.08	10.75	100.00
81 MALUKU	27.78	50.00	0.93	21.30	100.00
82 MALUKU UTARA	66.67	28.33	0.56	4.44	100.00
91 PAPUA BARAT	37.84	48.65	-	13.51	100.00
94 P A P U A	52.94	47.06	-	-	100.00
INDONESIA	23.83	61.54	4.66	9.97	100.00

TABEL 1.9: DISTRIBUSI PENGUNJUNG USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 2013

Provinsi	Indonesia		Asing		Jumlah	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 ACEH	97.55	96.84	2.45	3.16	100.00	100.00
12 SUMATERA UTARA	98.15	97.71	1.85	2.29	100.00	100.00
13 SUMATERA BARAT	98.12	98.38	1.88	1.62	100.00	100.00
14 R I A U	99.90	99.84	0.10	0.16	100.00	100.00
15 J A M B I	98.95	98.98	1.05	1.02	100.00	100.00
16 SUMATERA SELATAN	99.92	99.75	0.08	0.25	100.00	100.00
17 BENGKULU	99.84	99.66	0.16	0.34	100.00	100.00
18 LAMPUNG	99.93	99.94	0.07	0.06	100.00	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	98.60	98.43	1.40	1.57	100.00	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	99.08	95.01	0.92	4.99	100.00	100.00
31 DKI JAKARTA	98.21	91.99	1.79	8.01	100.00	100.00
32 JAWA BARAT	97.04	97.16	2.96	2.84	100.00	100.00
33 JAWA TENGAH	98.05	98.51	1.95	1.49	100.00	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	95.70	95.18	4.30	4.82	100.00	100.00
35 JAWA TIMUR	99.64	99.83	0.36	0.17	100.00	100.00
36 B A N T E N	99.91	99.87	0.09	0.13	100.00	100.00
51 B A L I	55.95	54.70	44.05	45.30	100.00	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	60.86	61.03	39.14	38.97	100.00	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	83.66	81.39	16.34	18.61	100.00	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	99.95	99.93	0.05	0.07	100.00	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	95.00	95.31	5.00	4.69	100.00	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	99.87	99.87	0.13	0.13	100.00	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	99.37	99.22	0.63	0.78	100.00	100.00
71 SULAWESI UTARA	99.47	99.47	0.53	0.53	100.00	100.00
72 SULAWESI TENGAH	99.92	99.80	0.08	0.20	100.00	100.00
73 SULAWESI SELATAN	98.60	96.97	1.40	3.03	100.00	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	99.52	99.43	0.48	0.57	100.00	100.00
75 GORONTALO	99.88	99.81	0.12	0.19	100.00	100.00
76 SULAWESI BARAT	99.99	99.99	0.01	0.01	100.00	100.00
81 MALUKU	99.08	99.06	0.92	0.94	100.00	100.00
82 MALUKU UTARA	98.46	97.73	1.54	2.27	100.00	100.00
91 PAPUA BARAT	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00
94 P A P U A	96.91	96.30	3.09	3.70	100.00	100.00
INDONESIA	94.87	94.01	5.13	5.99	100.00	100.00

TABEL 1.10: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN JENIS LAYANAN YANG TERSEDIA TAHUN 2013

Provinsi	Jenis Layanan					
	Asuransi		Pusat Informasi		Interpretasi Objek	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 ACEH	10.71	89.29	35.71	64.29	42.86	57.14
12 SUMATERA UTARA	9.09	90.91	34.09	65.91	34.09	65.91
13 SUMATERA BARAT	33.33	66.67	42.86	57.14	35.71	64.29
14 R I A U	35.71	64.29	57.14	42.86	57.14	42.86
15 J A M B I	7.69	92.31	69.23	30.77	53.85	46.15
16 SUMATERA SELATAN	31.58	68.42	73.68	26.32	57.89	42.11
17 BENGKULU	7.69	92.31	53.85	46.15	38.46	61.54
18 LAMPUNG	30.43	69.57	47.83	52.17	34.78	65.22
19 KEP. BANGKA BELITUNG	15.79	84.21	68.42	31.58	47.37	52.63
21 KEPULAUAN RIAU	23.08	76.92	53.85	46.15	30.77	69.23
31 DKI JAKARTA	37.50	62.50	95.00	5.00	75.00	25.00
32 JAWA BARAT	46.15	53.85	74.18	25.82	51.10	48.90
33 JAWA TENGAH	65.14	34.86	75.43	24.57	56.57	43.43
34 D.I. YOGYAKARTA	67.86	32.14	76.79	23.21	48.21	51.79
35 JAWA TIMUR	45.45	54.55	81.82	18.18	61.62	38.38
36 B A N T E N	26.83	73.17	43.90	56.10	29.27	70.73
51 B A L I	29.33	70.67	69.33	30.67	53.33	46.67
52 NUSA TENGGARA BARAT	7.69	92.31	57.69	42.31	38.46	61.54
53 NUSA TENGGARA TIMUR	1.79	98.21	21.43	78.57	17.86	82.14
61 KALIMANTAN BARAT	41.18	58.82	52.94	47.06	41.18	58.82
62 KALIMANTAN TENGAH	6.25	93.75	37.50	62.50	37.50	62.50
63 KALIMANTAN SELATAN	18.52	81.48	55.56	44.44	37.04	62.96
64 KALIMANTAN TIMUR	19.23	80.77	65.38	34.62	38.46	61.54
71 SULAWESI UTARA	10.00	90.00	10.00	90.00	30.00	70.00
72 SULAWESI TENGAH	-	100.00	30.00	70.00	20.00	80.00
73 SULAWESI SELATAN	9.72	90.28	52.78	47.22	48.61	51.39
74 SULAWESI TENGGARA	5.88	94.12	29.41	70.59	29.41	70.59
75 GORONTALO	-	100.00	33.33	66.67	44.44	55.56
76 SULAWESI BARAT	-	100.00	12.50	87.50	-	100.00
81 MALUKU	6.25	93.75	12.50	87.50	12.50	87.50
82 MALUKU UTARA	-	100.00	-	100.00	10.53	89.47
91 PAPUA BARAT	-	100.00	25.00	75.00	-	100.00
94 P A P U A	-	100.00	-	100.00	6.67	93.33
INDONESIA	32.46	67.54	59.17	40.83	45.06	54.94

TABEL 1.10: Lanjutan

Provinsi	Jenis Layanan					
	Standart Operating Procedure (SOP)		Prosedur Keamanan		Pramuwisata	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11 ACEH	42.86	57.14	46.43	53.57	21.43	78.57
12 SUMATERA UTARA	38.64	61.36	34.09	65.91	34.09	65.91
13 SUMATERA BARAT	45.24	54.76	54.76	45.24	38.10	61.90
14 R I A U	57.14	42.86	57.14	42.86	28.57	71.43
15 J A M B I	53.85	46.15	69.23	30.77	53.85	46.15
16 SUMATERA SELATAN	78.95	21.05	73.68	26.32	42.11	57.89
17 BENGKULU	46.15	53.85	46.15	53.85	23.08	76.92
18 LAMPUNG	47.83	52.17	69.57	30.43	26.09	73.91
19 KEP. BANGKA BELITUNG	63.16	36.84	63.16	36.84	42.11	57.89
21 KEPULAUAN RIAU	53.85	46.15	53.85	46.15	23.08	76.92
31 DKI JAKARTA	97.50	2.50	92.50	7.50	70.00	30.00
32 JAWA BARAT	69.23	30.77	72.53	27.47	46.70	53.30
33 JAWA TENGAH	66.86	33.14	71.43	28.57	46.29	53.71
34 D.I. YOGYAKARTA	66.07	33.93	85.71	14.29	55.36	44.64
35 JAWA TIMUR	77.78	22.22	74.75	25.25	47.47	52.53
36 B A N T E N	58.54	41.46	60.98	39.02	29.27	70.73
51 B A L I	64.00	36.00	56.00	44.00	53.33	46.67
52 NUSA TENGGARA BARAT	50.00	50.00	61.54	38.46	61.54	38.46
53 NUSA TENGGARA TIMUR	23.21	76.79	25.00	75.00	21.43	78.57
61 KALIMANTAN BARAT	35.29	64.71	35.29	64.71	23.53	76.47
62 KALIMANTAN TENGAH	43.75	56.25	31.25	68.75	56.25	43.75
63 KALIMANTAN SELATAN	44.44	55.56	55.56	44.44	33.33	66.67
64 KALIMANTAN TIMUR	61.54	38.46	65.38	34.62	50.00	50.00
71 SULAWESI UTARA	40.00	60.00	30.00	70.00	30.00	70.00
72 SULAWESI TENGAH	35.00	65.00	40.00	60.00	35.00	65.00
73 SULAWESI SELATAN	50.00	50.00	51.39	48.61	45.83	54.17
74 SULAWESI TENGGARA	41.18	58.82	35.29	64.71	35.29	64.71
75 GORONTALO	55.56	44.44	55.56	44.44	44.44	55.56
76 SULAWESI BARAT	12.50	87.50	12.50	87.50	12.50	87.50
81 MALUKU	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00
82 MALUKU UTARA	15.79	84.21	15.79	84.21	26.32	73.68
91 PAPUA BARAT	25.00	75.00	25.00	75.00	25.00	75.00
94 P A P U A	6.67	93.33	33.33	66.67	20.00	80.00
INDONESIA	57.26	42.74	59.97	40.03	42.26	57.74

**TABEL 1.11: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL
DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN JENIS FASILITAS YANG TERSEDIA TAHUN 2013**

Provinsi	Jenis Fasilitas									
	Tempat Ibadah		Layanan Makan Minum		Toko Cenderamata		Toilet Umum		Area Parkir	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11 ACEH	82.14	17.86	82.14	17.86	28.57	71.43	89.29	10.71	85.71	14.29
12 SUMATERA UTARA	72.73	27.27	86.36	13.64	47.73	52.27	95.45	4.55	90.91	9.09
13 SUMATERA BARAT	90.48	9.52	61.90	38.10	50.00	50.00	85.71	14.29	85.71	14.29
14 R I A U	92.86	7.14	64.29	35.71	42.86	57.14	92.86	7.14	78.57	21.43
15 J A M B I	84.62	15.38	84.62	15.38	76.92	23.08	92.31	7.69	100.00	-
16 SUMATERA SELATAN	100.00	-	68.42	31.58	47.37	52.63	100.00	-	94.74	5.26
17 BENGKULU	61.54	38.46	61.54	38.46	15.38	84.62	92.31	7.69	92.31	7.69
18 LAMPUNG	91.30	8.70	73.91	26.09	21.74	78.26	100.00	-	86.96	13.04
19 KEP. BANGKA BELITUNG	94.74	5.26	89.47	10.53	57.89	42.11	94.74	5.26	89.47	10.53
21 KEPULAUAN RIAU	92.31	7.69	92.31	7.69	38.46	61.54	100.00	-	100.00	-
31 DKI JAKARTA	95.00	5.00	67.50	32.50	67.50	32.50	100.00	-	92.50	7.50
32 JAWA BARAT	90.66	9.34	73.08	26.92	50.55	49.45	95.05	4.95	93.96	6.04
33 JAWA TENGAH	85.14	14.86	73.14	26.86	45.14	54.86	93.71	6.29	92.57	7.43
34 D.I. YOGYAKARTA	91.07	8.93	78.57	21.43	62.50	37.50	92.86	7.14	98.21	1.79
35 JAWA TIMUR	89.90	10.10	85.86	14.14	73.74	26.26	95.96	4.04	93.94	6.06
36 B A N T E N	82.93	17.07	65.85	34.15	26.83	73.17	92.68	7.32	85.37	14.63
51 B A L I	65.33	34.67	58.67	41.33	57.33	42.67	86.67	13.33	89.33	10.67
52 NUSA TENGGARA BARAT	69.23	30.77	65.38	34.62	34.62	65.38	96.15	3.85	96.15	3.85
53 NUSA TENGGARA TIMUR	14.29	85.71	14.29	85.71	16.07	83.93	60.71	39.29	50.00	50.00
61 KALIMANTAN BARAT	88.24	11.76	88.24	11.76	23.53	76.47	88.24	11.76	76.47	23.53
62 KALIMANTAN TENGAH	31.25	68.75	43.75	56.25	31.25	68.75	87.50	12.50	75.00	25.00
63 KALIMANTAN SELATAN	81.48	18.52	59.26	40.74	37.04	62.96	100.00	-	100.00	-
64 KALIMANTAN TIMUR	76.92	23.08	73.08	26.92	38.46	61.54	96.15	3.85	88.46	11.54
71 SULAWESI UTARA	10.00	90.00	30.00	70.00	10.00	90.00	90.00	10.00	80.00	20.00
72 SULAWESI TENGAH	45.00	55.00	65.00	35.00	15.00	85.00	95.00	5.00	90.00	10.00
73 SULAWESI SELATAN	54.17	45.83	51.39	48.61	36.11	63.89	87.50	12.50	80.56	19.44
74 SULAWESI TENGGARA	52.94	47.06	58.82	41.18	17.65	82.35	94.12	5.88	88.24	11.76
75 GORONTALO	77.78	22.22	77.78	22.22	44.44	55.56	100.00	-	100.00	-
76 SULAWESI BARAT	25.00	75.00	12.50	87.50	12.50	87.50	100.00	-	100.00	-
81 MALUKU	18.75	81.25	56.25	43.75	12.50	87.50	87.50	12.50	68.75	31.25
82 MALUKU UTARA	21.05	78.95	52.63	47.37	21.05	78.95	73.68	26.32	63.16	36.84
91 PAPUA BARAT	75.00	25.00	50.00	50.00	25.00	75.00	100.00	-	100.00	-
94 P A P U A	20.00	80.00	-	100.00	26.67	73.33	46.67	53.33	66.67	33.33
INDONESIA	74.80	25.20	66.67	33.33	44.18	55.82	91.15	8.85	88.12	11.88

TABEL 1.12: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN SUMBER AIR BERSIH TAHUN 2013

Provinsi	Sumber Air Bersih				Jumlah
	Air Tanah	PDAM	Air Tanah & PDAM	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 ACEH	64.29	3.57	21.43	10.71	100.00
12 SUMATERA UTARA	75.00	13.64	9.09	2.27	100.00
13 SUMATERA BARAT	40.48	26.19	16.67	16.67	100.00
14 R I A U	92.86	7.14	-	-	100.00
15 J A M B I	46.15	30.77	-	23.08	100.00
16 SUMATERA SELATAN	36.84	57.89	5.26	-	100.00
17 BENGKULU	61.54	7.69	7.69	23.08	100.00
18 LAMPUNG	65.22	4.35	13.04	17.39	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	78.95	5.26	10.53	5.26	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	76.92	23.08	-	-	100.00
31 DKI JAKARTA	45.00	27.50	27.50	-	100.00
32 JAWA BARAT	67.58	10.44	14.29	7.69	100.00
33 JAWA TENGAH	73.71	10.29	12.57	3.43	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	60.71	12.50	25.00	1.79	100.00
35 JAWA TIMUR	66.67	12.12	19.19	2.02	100.00
36 B A N T E N	75.61	2.44	7.32	14.63	100.00
51 B A L I	50.67	25.33	17.33	6.67	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	61.54	15.38	15.38	7.69	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	51.79	17.86	-	30.36	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	58.82	29.41	-	11.76	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	75.00	12.50	12.50	-	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	44.44	25.93	18.52	11.11	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	30.77	34.62	23.08	11.54	100.00
71 SULAWESI UTARA	80.00	-	10.00	10.00	100.00
72 SULAWESI TENGAH	60.00	10.00	20.00	10.00	100.00
73 SULAWESI SELATAN	58.33	8.33	19.44	13.89	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	94.12	-	5.88	-	100.00
75 GORONTALO	44.44	11.11	44.44	-	100.00
76 SULAWESI BARAT	50.00	50.00	-	-	100.00
81 MALUKU	87.50	6.25	6.25	-	100.00
82 MALUKU UTARA	47.37	21.05	10.53	21.05	100.00
91 PAPUA BARAT	100.00	-	-	-	100.00
94 P A P U A	53.33	26.67	-	20.00	100.00
INDONESIA	62.92	14.83	14.04	8.21	100.00

TABEL 1.13: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI DAN SUMBER LISTRIK TAHUN 2013

Provinsi	Sumber Listrik				Jumlah
	PLN	Internal	PLN & Internal	Tidak Menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 ACEH	64.29	3.57	14.29	17.86	100.00
12 SUMATERA UTARA	79.55	2.27	13.64	4.55	100.00
13 SUMATERA BARAT	69.05	-	7.14	23.81	100.00
14 R I A U	42.86	-	21.43	35.71	100.00
15 J A M B I	69.23	-	7.69	23.08	100.00
16 SUMATERA SELATAN	78.95	5.26	15.79	-	100.00
17 BENGKULU	76.92	-	7.69	15.38	100.00
18 LAMPUNG	60.87	13.04	13.04	13.04	100.00
19 KEP. BANGKA BELITUNG	52.63	10.53	31.58	5.26	100.00
21 KEPULAUAN RIAU	46.15	30.77	7.69	15.38	100.00
31 DKI JAKARTA	70.00	7.50	22.50	-	100.00
32 JAWA BARAT	78.57	1.10	12.09	8.24	100.00
33 JAWA TENGAH	76.00	1.14	16.00	6.86	100.00
34 D.I. YOGYAKARTA	75.00	1.79	19.64	3.57	100.00
35 JAWA TIMUR	77.78	5.05	10.10	7.07	100.00
36 B A N T E N	73.17	2.44	7.32	17.07	100.00
51 B A L I	80.00	-	8.00	12.00	100.00
52 NUSA TENGGARA BARAT	80.77	-	11.54	7.69	100.00
53 NUSA TENGGARA TIMUR	33.93	5.36	1.79	58.93	100.00
61 KALIMANTAN BARAT	70.59	5.88	11.76	11.76	100.00
62 KALIMANTAN TENGAH	56.25	18.75	18.75	6.25	100.00
63 KALIMANTAN SELATAN	74.07	7.41	3.70	14.81	100.00
64 KALIMANTAN TIMUR	88.46	3.85	7.69	-	100.00
71 SULAWESI UTARA	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00
72 SULAWESI TENGAH	65.00	-	5.00	30.00	100.00
73 SULAWESI SELATAN	70.83	4.17	4.17	20.83	100.00
74 SULAWESI TENGGARA	58.82	-	11.76	29.41	100.00
75 GORONTALO	100.00	-	-	-	100.00
76 SULAWESI BARAT	50.00	12.50	12.50	25.00	100.00
81 MALUKU	56.25	6.25	-	37.50	100.00
82 MALUKU UTARA	42.11	21.05	-	36.84	100.00
91 PAPUA BARAT	75.00	-	25.00	-	100.00
94 P A P U A	66.67	-	-	33.33	100.00
INDONESIA	70.97	3.75	11.32	13.96	100.00

TABEL 1.14: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI, SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH, DAN PEMBERLAKUAN KONSEP 3R TAHUN 2013

Provinsi	Pengolahan Limbah				Konsep 3R	
	Internal	Keluar Kawasan	Tidak Diolah	Lainnya	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 ACEH	3.57	39.29	25.00	32.14	3.57	96.43
12 SUMATERA UTARA	11.36	54.55	22.73	11.36	18.18	81.82
13 SUMATERA BARAT	4.76	50.00	21.43	23.81	7.14	92.86
14 R I A U	28.57	-	28.57	42.86	14.29	85.71
15 J A M B I	15.38	15.38	61.54	7.69	15.38	84.62
16 SUMATERA SELATAN	10.53	63.16	10.53	15.79	26.32	73.68
17 BENGKULU	15.38	46.15	23.08	15.38	23.08	76.92
18 LAMPUNG	13.04	43.48	21.74	21.74	39.13	60.87
19 KEP. BANGKA BELITUNG	15.79	31.58	-	52.63	31.58	68.42
21 KEPULAUAN RIAU	23.08	30.77	30.77	15.38	30.77	69.23
31 DKI JAKARTA	47.50	45.00	5.00	2.50	42.50	57.50
32 JAWA BARAT	22.53	54.40	9.34	13.74	28.57	71.43
33 JAWA TENGAH	17.71	46.86	22.86	12.57	19.43	80.57
34 D.I. YOGYAKARTA	17.86	37.50	21.43	23.21	10.71	89.29
35 JAWA TIMUR	14.14	43.43	23.23	19.19	22.22	77.78
36 B A N T E N	21.95	17.07	34.15	26.83	14.63	85.37
51 B A L I	28.00	46.67	14.67	10.67	30.67	69.33
52 NUSA TENGGARA BARAT	11.54	42.31	15.38	30.77	3.85	96.15
53 NUSA TENGGARA TIMUR	1.79	35.71	57.14	5.36	14.29	85.71
61 KALIMANTAN BARAT	5.88	17.65	23.53	52.94	23.53	76.47
62 KALIMANTAN TENGAH	25.00	43.75	25.00	6.25	18.75	81.25
63 KALIMANTAN SELATAN	22.22	33.33	33.33	11.11	37.04	62.96
64 KALIMANTAN TIMUR	15.38	61.54	-	23.08	30.77	69.23
71 SULAWESI UTARA	30.00	20.00	20.00	30.00	40.00	60.00
72 SULAWESI TENGAH	-	30.00	50.00	20.00	-	100.00
73 SULAWESI SELATAN	12.50	33.33	33.33	20.83	16.67	83.33
74 SULAWESI TENGGARA	17.65	58.82	5.88	17.65	29.41	70.59
75 GORONTALO	-	22.22	44.44	33.33	-	100.00
76 SULAWESI BARAT	-	75.00	12.50	12.50	-	100.00
81 MALUKU	31.25	62.50	-	6.25	25.00	75.00
82 MALUKU UTARA	21.05	36.84	42.11	-	5.26	94.74
91 PAPUA BARAT	50.00	25.00	25.00	-	50.00	50.00
94 P A P U A	-	6.67	80.00	13.33	6.67	93.33
INDONESIA	17.30	42.74	22.89	17.07	21.21	78.79

**TABEL 1.15: RATA-RATA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN USAHA/ PERUSAHAAN
OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2013**

Provinsi	Jumlah Usaha	Pendapatan	Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
11 ACEH	54	189 330 429	174 984 371
12 SUMATERA UTARA	54	989 963 768	715 909 452
13 SUMATERA BARAT	51	728 662 601	400 752 441
14 R I A U	21	1 046 133 679	1 600 324 193
15 J A M B I	15	729 177 838	973 183 232
16 SUMATERA SELATAN	21	823 407 895	583 148 939
17 BENGKULU	14	58 234 462	33 020 015
18 LAMPUNG	53	376 562 865	266 637 948
19 KEP. BANGKA BELITUNG	23	752 041 411	786 497 130
21 KEPULAUAN RIAU	21	464 585 438	472 547 506
31 DKI JAKARTA	69	53 446 678 823	16 370 171 197
32 JAWA BARAT	240	2 009 824 816	1 568 506 626
33 JAWA TENGAH	199	1 950 314 672	1 436 454 404
34 D.I. YOGYAKARTA	67	2 312 334 118	3 900 986 136
35 JAWA TIMUR	183	1 612 750 073	1 049 699 217
36 B A N T E N	58	616 225 089	388 480 192
51 B A L I	89	2 686 652 834	1 623 802 132
52 NUSA TENGGARA BARAT	30	253 081 293	136 428 186
53 NUSA TENGGARA TIMUR	71	168 647 010	625 676 435
61 KALIMANTAN BARAT	23	653 316 202	771 905 942
62 KALIMANTAN TENGAH	22	128 648 594	69 272 369
63 KALIMANTAN SELATAN	34	260 914 415	198 184 517
64 KALIMANTAN TIMUR	37	475 471 711	541 181 789
71 SULAWESI UTARA	28	291 192 400	146 753 000
72 SULAWESI TENGAH	51	37 068 340	118 298 371
73 SULAWESI SELATAN	96	248 088 101	230 408 128
74 SULAWESI TENGGARA	17	158 246 941	128 644 118
75 GORONTALO	14	104 199 111	1 811 878 056
76 SULAWESI BARAT	8	53 852 125	32 056 250
81 MALUKU	24	96 380 784	21 463 013
82 MALUKU UTARA	24	108 083 895	21 105 263
91 PAPUA BARAT	28	402 350 000	247 475 000
94 P A P U A	20	63 890 667	31 436 000
INDONESIA	1 759	2 862 991 426	1 509 070 821

**TABEL 2.1: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL
DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN BENTUK BADAN HUKUM TAHUN 2013**

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Badan Hukum			Tidak Berbadan Hukum	Jumlah
	PT/ PT (Persero)/ Perum	UPT (Pemerintah)	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Daya Tarik Wisata Alam	10.19	63.89	10.19	15.74	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	6.53	59.18	13.47	20.82	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	30.00	30.00	17.78	22.22	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	21.87	33.26	12.07	32.80	100.00
5 Kawasan Pariwisata	33.33	33.33	33.33	-	100.00
6 Wisata Tirta	28.57	7.14	21.43	42.86	100.00
INDONESIA	15.71	47.77	12.52	24.00	100.00

**TABEL 2.2: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL
DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN TAHUN BEROPERASI KOMERSIAL TAHUN 2013**

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Tahun Mulai Beroperasi					Jumlah
	< 1980	1980 - 1989	1990 - 1999	2000 - 2009	> 2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Daya Tarik Wisata Alam	9.95	16.67	23.38	31.48	18.52	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	26.12	20.00	19.18	20.41	14.29	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	2.22	12.22	14.44	46.67	24.44	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	4.10	12.30	16.17	39.86	27.56	100.00
5 Kawasan Pariwisata	-	16.67	50.00	33.33	-	100.00
6 Wisata Tirta	2.38	-	14.29	45.24	38.10	100.00
INDONESIA	10.21	14.91	19.22	33.81	21.85	100.00

TABEL 2.3: DISTRIBUSI USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN HARGA TIKET TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Harga Tiket				Jumlah
	< 5.000	5.000 - 20.000	21.000 - 100.000	> 100.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1 Daya Tarik Wisata Alam	44.21	50.23	3.70	1.85	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	61.22	29.80	8.57	0.41	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	34.44	53.33	8.89	3.33	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	39.41	47.15	12.07	1.37	100.00
5 Kawasan Pariwisata	16.67	66.67	16.67	-	100.00
6 Wisata Tirta	19.05	23.81	19.05	38.10	100.00
INDONESIA	44.18	44.58	8.53	2.71	100.00

TABEL 2.4: DISTRIBUSI PEKERJA PADA USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA, KEWARGANEGARAAN, STATUS PEKERJA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Kewarganegaraan Pekerja						Jumlah	
	Status Pekerja WNI				Pekerja WNA			
	Tetap		Kontrak/ Tidak tetap					
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Daya Tarik Wisata Alam	47.03	14.07	31.65	7.23	0.02	-	78.70	21.30
2 Daya Tarik Wisata Budaya	48.05	17.99	27.27	6.69	-	-	75.32	24.68
3 Daya Tarik Wisata Buatan	35.59	16.48	36.35	11.54	0.04	-	71.98	28.02
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	41.80	15.57	30.41	11.93	0.06	0.24	72.26	27.74
5 Kawasan Pariwisata	48.37	28.20	15.97	7.28	0.09	0.09	64.43	35.57
6 Wisata Tirta	49.20	14.36	31.91	4.39	0.13	-	81.25	18.75
INDONESIA	44.39	16.01	30.27	9.20	0.04	0.09	74.70	25.30

Catatan : L = Laki-laki
P = Perempuan

TABEL 2.5: DISTRIBUSI PEKERJA PADA USAHA/ PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Pendidikan				Jumlah
	≤ SMP	SMA	Diploma I/II/II	Universitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Daya Tarik Wisata Alam	22.35	63.05	5.18	9.43	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	24.59	53.42	4.73	17.26	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	25.61	58.37	5.66	10.36	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	24.68	63.54	4.57	7.21	100.00
5 Kawasan Pariwisata	8.40	82.63	0.47	8.50	100.00
6 Wisata Tirta	39.36	51.73	1.20	7.71	100.00
INDONESIA	23.83	61.54	4.66	9.97	100.00

TABEL 2.6: DISTRIBUSI PENGUNJUNG USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Indonesia	Asing	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Daya Tarik Wisata Alam	96.61	3.39	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	87.63	12.37	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	99.62	0.38	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	97.09	2.91	100.00
5 Kawasan Pariwisata	86.44	13.56	100.00
6 Wisata Tirta	97.08	2.92	100.00
INDONESIA	94.01	5.99	100.00

TABEL 2.7: DISTRIBUSI USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN JENIS LAYANAN YANG TERSEDIA TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Jenis Layanan					
	Asuransi		Pusat Informasi		Interpretasi Objek	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Daya Tarik Wisata Alam	35.65	64.35	57.41	42.59	43.06	56.94
2 Daya Tarik Wisata Budaya	15.92	84.08	69.39	30.61	58.78	41.22
3 Daya Tarik Wisata Buatan	41.11	58.89	67.78	32.22	58.89	41.11
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	35.99	64.01	53.53	46.47	36.90	63.10
5 Kawasan Pariwisata	33.33	66.67	66.67	33.33	50.00	50.00
6 Wisata Tirta	40.48	59.52	57.14	42.86	40.48	59.52
INDONESIA	32.46	67.54	59.17	40.83	45.06	54.94

TABEL 2.7: LANJUTAN

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Jenis Layanan					
	Standard Operating Procedure (SOP)		Prosedur Keamanan		Pramuwisata	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(8)	(9)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Daya Tarik Wisata Alam	55.79	44.21	57.87	42.13	41.20	58.80
2 Daya Tarik Wisata Budaya	61.63	38.37	53.88	46.12	61.63	38.37
3 Daya Tarik Wisata Buatan	68.89	31.11	74.44	25.56	53.33	46.67
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	52.85	47.15	61.73	38.27	29.84	70.16
5 Kawasan Pariwisata	66.67	33.33	66.67	33.33	33.33	66.67
6 Wisata Tirta	66.67	33.33	66.67	33.33	47.62	52.38
INDONESIA	57.26	42.74	59.97	40.03	42.26	57.74

TABEL 2.8: DISTRIBUSI USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN JENIS FASILITAS YANG TERSEDIA TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Jenis Fasilitas									
	Tempat Ibadah		Layanan Makan Minum		Toko Cenderamata		Toilet Umum		Area Parkir	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Daya Tarik Wisata Alam	72.69	27.31	65.05	34.95	42.36	57.64	88.89	11.11	88.43	11.57
2 Daya Tarik Wisata Budaya	70.61	29.39	43.27	56.73	48.16	51.84	89.39	10.61	84.49	15.51
3 Daya Tarik Wisata Buatan	85.56	14.44	78.89	21.11	44.44	55.56	95.56	4.44	94.44	5.56
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	77.22	22.78	77.22	22.78	44.65	55.35	93.39	6.61	88.38	11.62
5 Kawasan Pariwisata	100.00	-	83.33	16.67	66.67	33.33	100.00	-	100.00	-
6 Wisata Tirta	69.05	30.95	80.95	19.05	30.95	69.05	90.48	9.52	88.10	11.90
INDONESIA	74.80	25.20	66.67	33.33	44.18	55.82	91.15	8.85	88.12	11.88

TABEL 2.9: DISTRIBUSI USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN SUMBER AIR BERSIH TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Air bersih				Jumlah
	Air Tanah	PDAM	Air Tanah & PDAM	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Daya Tarik Wisata Alam	68.06	9.26	9.03	13.66	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	47.76	28.16	18.78	5.31	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	66.67	14.44	15.56	3.33	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	64.24	13.44	16.40	5.92	100.00
5 Kawasan Pariwisata	66.67	16.67	16.67	-	100.00
6 Wisata Tirta	76.19	9.52	9.52	4.76	100.00
INDONESIA	62.92	14.83	14.04	8.21	100.00

TABEL 2.10: DISTRIBUSI USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA DAN SUMBER LISTRIK TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Tenaga Listrik				Jumlah
	PLN	Internal	PLN & Internal	Tidak Menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Daya Tarik Wisata Alam	67.36	5.09	6.48	21.06	100.00
2 Daya Tarik Wisata Budaya	82.86	1.63	7.76	7.76	100.00
3 Daya Tarik Wisata Buatan	75.56	1.11	18.89	4.44	100.00
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	66.97	3.87	15.95	13.21	100.00
5 Kawasan Pariwisata	50.00	-	50.00	-	100.00
6 Wisata Tirta	73.81	7.14	11.90	7.14	100.00
INDONESIA	70.97	3.75	11.32	13.96	100.00

TABEL 2.11: DISTRIBUSI USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA, SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH, DAN PEMBERLAKUAN KONSEP 3R TAHUN 2013

Jenis Objek Daya Tarik Wisata	Pengolahan Limbah				Konsep 3R	
	Internal	Keluar Kawasan	Tidak diolah	Lainnya	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
1 Daya Tarik Wisata Alam	14.4	40.7	24.3	20.6	17.82	82.18
2 Daya Tarik Wisata Budaya	14.69	51.84	21.63	11.84	21.22	78.78
3 Daya Tarik Wisata Buatan	31.11	42.22	14.44	12.22	27.78	72.22
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	18.22	39.64	24.15	18.00	21.64	78.36
5 Kawasan Pariwisata	16.67	50.00	0.00	33.33	33.33	66.67
6 Wisata Tirta	23.81	42.86	23.81	9.52	35.71	64.29
INDONESIA	17.30	42.74	22.89	17.07	21.21	78.79

TABEL 2.12: RATA-RATA PENDAPATAN DAN PENGELUARAN USAHA/PERUSAHAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA KOMERSIAL DIRINCI MENURUT JENIS USAHA PARIWISATA TAHUN 2013

	Jumlah Usaha	Pendapatan (rupiah)	Pengeluaran (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Daya Tarik Wisata Alam	650	1 047 233 804	770 573 004
2 Daya Tarik Wisata Budaya	326	1 564 507 997	1 723 557 888
3 Daya Tarik Wisata Buatan	150	1 972 702 178	1 671 528 634
4 Taman Hiburan dan Rekreasi	530	2 930 610 750	1 032 705 579
5 Kawasan Pariwisata	5	209 518 673 157	84 946 842 113
6 Wisata Tirta	98	792 581 707	565 219 295
INDONESIA	1 759	2 862 991 426	1 509 070 821

